



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Budiono, Rahmad, Abdul, 1997, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja  
Grafindo Perkasa, Jakarta

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta

Djumaldji, F.X, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Hadisoeparto, Hartono, 2001, *Pengantar Tata Usaha Indonesia*, Liberty,  
Yogyakarta

Halim, A. Ridwan, et. All, 1987, *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya  
Paramitha, Jakarta

Hakim, Abdul, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor.13 Tahun 2003*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Marka, Roekmono, 1981, *Masalah Pengupahan di Dalam Hubungan  
Perburuhan*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah ada,  
Yogyakarta

Soepomo, Iman, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Penerbit  
Djambatan, Jakarta



-----, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta

Sastrodihadiwiryono, Siswanto, B, 2002, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif dan Operasional*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239).



Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-102/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 72 Seri E)

Perjanjian Kerja No. 132/Bor. RA/XI/LMG/2015 antara Ambono Wahyudianto dengan Untung Widodo



Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT. PG. Rajawali I Unit PG. Rejo Agung Baru dengan Serikat Pekerja “Sejahtera” PT PG. Rajawaili I Unit PG. Rejo Agung Baru Madiun

### **Jurnal, Penelitian dan Penulisan Hukum**

Kertonegoro, Sentanoe, 2000, *Penetapan Upah Minimum (Minimum Wage Fixing) International Labour Organization (ILO)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta

Das, Bordia, Maitreyi, 2004, *Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Pasar Tenaga Kerja : Kasus Timor Leste Dalam Perspektif Komparatif*, Bank Dunia-Timor Leste, Dili, Republik Timor Leste

Syafrudin, Farid, Miftah, 2013, *Penerapan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Pada Sektor Informal (Pekerja Counter Pulsa) di Wilayah Kabupaten Sleman, Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sari, Juwita, Etsa, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Perusahaan Otobus (PO) Pelita Baru Pariwisata Tegal Jawa Tengah, Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



### **Internet**

Hstin597, “Pengertian Masyarakat Ekonomi Asean”,

<https://hstin597.wordpress.com/2015/01/28/pengertian-masyarakat-ekonomi-asean-mea/>, diakses pada tanggal 23-12-2015

Hukumonline.com, “Aturan tentang Pekerja Harian Lepas”,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d291d7a6680/aturan-tentang-pekerja-harian-lepas>, diakses pada tanggal 03-01-2016

Hukumonline.com, “Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK Oleh Juanda Pangaribuan”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4b372fe9227/legalitas-ioutsourcing-i-pasca-putusan-mkbr-oleh--juanda-pangaribuan>, diakses pada tanggal 29-01-2016